



## Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan *Civic Disposition* Bagi Peserta Didik

Asli Sadar Hati Lahagu <sup>1\*</sup>, Amstrong Harefa <sup>2</sup>, Fatiani Lase <sup>3</sup>, Berkat Persada Lase <sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup> Universitas Nias, Indonesia

Alamat: Jalan Yos Sudarso 118 E/S Gunungsitoli, 22812  
Korespondensi penulis: [aslisadarhatilahagupkn@gmail.com](mailto:aslisadarhatilahagupkn@gmail.com) \*

**Abstract.** *Civic disposition is an important aspect of civic education, because it functions to shape the character of students who are responsible, tolerant, and active in democratic life. This study aims to describe and analyze the role of school principals, Civics teachers in instilling civic disposition to students at UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara. Using a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observation, interviews. Using thematic analysis techniques to explore various information from related parties in the schools studied. The results showed that Civics teachers have a strategic role in instilling civic disposition through active learning approaches, providing role models, and integrating civic values in intracurricular and extracurricular activities. Although there are several obstacles such as limited learning time and lack of support from the outside environment, teachers still try to shape students' positive attitudes towards democratic values, social responsibility, and respect for differences. Thus, the role of Civics teachers is very significant in shaping young citizens who have character and contribute to the life of the nation and state.*

**Keywords:** *Civic Disposition, Learners, Teacher*

**Abstrak.** Civic disposition atau watak sikap kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan, sebab berfungsi membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab, toleran, serta aktif dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran kepala sekolah, guru PPKn dalam menanamkan civic disposition kepada peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara. Menggunakan teknik analisis tematik untuk menggali berbagai informasi dari pihak terkait di sekolah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan guru PPKn memiliki peran strategis dalam menanamkan civic disposition melalui pendekatan pembelajaran aktif, pemberian keteladanan, serta integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu pembelajaran dan kurangnya dukungan lingkungan luar sekolah, guru tetap berupaya membentuk sikap positif siswa terhadap nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, peran guru PPKn sangat signifikan dalam membentuk warga negara muda yang berkarakter dan berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata kunci:** Civic Disposition, Guru, Peserta Didik.

### 1. LATAR BELAKANG

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya jiwa yang kompeten dan mempunyai karakter yang baik. Namun, saat ini hilangnya karakter kewarganegaraan pada peserta didik disebabkan oleh perkembangan zaman faktor sosial dan lingkungan, sehingga menimbulkan sikap egois karena cara pandang dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri yang membuat peserta didik melakukan kenakalan remaja di sekolah. Dalam konteks inilah proses membentuk perilaku

seseorang harus dibekali dengan penanaman karakter yang baik sehingga mampu membentuk pemikiran yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi bahwa sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

*Civic Disposition* atau yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau karakter yang mendukung dan mempromosikan kewarganegaraan dan pemerintahan. Branson mengatakan bahwa perilaku kewargaan merupakan karakteristik atau karakteristik publik dan privat yang sangat penting dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi. Sesuai dengan beberapa hal tersebut, maka penerapan karakter bangsa (*citizen character*) harus diciptakan melalui pendidikan. (Branson & Quigley, (1998))

Guru PPKn berperan penting membangun karakter warga negara yang baik agar kelak menjadi warga masyarakat sekaligus warga negara yang cerdas, terampil dan berwatak sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Pada tataran kurikuler PPKn baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya, sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pada dasarnya, guru PPKn bertanggung jawab dalam menanamkan perilaku peserta didik sesuai dengan manfaat dari pembentukan karakter. Dengan demikian, tugas pendidik dalam pembelajaran harus dilakukan secara efektif dan profesional, peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan pembelajaran namun, guru juga harus mendorong peserta didik dalam belajarkarena proses pendidikan dan pembelajaran menuntut peserta didik untuk secara sadar lebih mengembangkan informasi, pola pikir, dan kemampuan.

Menurut Usman menjelaskan bahwa “guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. (Usman, Husaini ;, 2010). Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-citanya dimasa depan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa guru adalah teladan, inspirator, dan motivator siswa yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan keahlian khusus, guru yang berperan sebagai teladan inspirator dan motivator bagi perserta didik tentunya menjadi bagian penting yang tidak dapat

tergantikan dalam proses pembelajaran. Dapat ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, menyediakan fasilitas belajar serta tugas guru untuk mengawasi dan membentuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari berbagai pernyataan di atas maka jelas sekali bahwa guru PPKn harus mempunyai tanggung jawab untuk membentuk peserta didiknya ke arah yang baik dan berperilaku positif dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik.

Saat ini masih ada beberapa diantara peserta didik di sekolah tidak memiliki rasa hormat dan segan terhadap guru-guru di sekolah, tidak hanya itu bahkan kepada orang tuanya sendiri pun melakukan hal yang sama. Hal tersebut dimulai karena tidak ada karakter atau watak yang selaluditanamkan dari dirinya. Berdasarkan observasi awal di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menurut salah seorang guru, jika melihat permasalahan yang ada saat ini, peran guru PPKn masih belum terlaksana secara optimal dalam penanaman (*civic disposition*) khususnya di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, dimana masih adanya peserta didik yang masih belum memiliki karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dengan baik dan masih ditemukan beberapa permasalahan seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Mandrehe Utara antara lain, masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak masuk saat pembelajaran, kurangnya kedisiplinan, merokok di lingkungan sekolah dan membuang sampah sembarangan. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya penanaman (*civic disposition*) karakter melalui mata pelajaran PPKn di tingkat sekolah.

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menanamkan civic disposition bagi peserta didik; untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam menanamkan civic disposition bagi peserta didik; untuk mengetahui apa upaya guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan civic disposition bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. (Mutmainah, Dewi ; Kamaluddin,; 2018). Beranjak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran adalah

aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang pada dasarnya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Guru dikatakan sebagai sosok suri tauladan dalam sebuah sistem pendidikan. Guru adalah sosok yang di gugu dan ditiru dari setiap perilaku, perkataan, serta sikapnya oleh seluruh peserta didik. Bahwa guru ialah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sadulloh Uyoh menjelaskan bahwa, Guru merupakan pendidik kedua setelah orang tua yang diberi tugas khusus untuk mencerdaskan anak bangsa. (Sadulloh , Uyoh;, 2010). Guru tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua di sekolah. Mereka menjadi pengganti karena tuntutan profesinya menjadi seorang guru. Selanjutnya Zayadi dan Majid menjelaskan bahwa guru berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohaniah-Nya agar mencapai tingkat kedewasaan. (Ahmad, Zayadi; Majid, Abdul ;, 2005).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu juga, peran guru di dalam kelas dapat mendukung pembentukan karakter di kelas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi.

PPKn sering juga disebut PKn atau pendidikan *civic*, yang membahas tentang kewarga negara, moral, norma, hukum, budi pekerti dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai sebuah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk menyiapkan warga masyarakat yang mampu untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, dengan aktivitas menanamkan kesadaran pada generasi baru, bahwa pengertian demokrasi merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang menjamin hak-hak dari masyarakat. (Raharjo, Sabar Budi;, 2012). Soemantri mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah usaha untuk dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan serta juga kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antar warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela Negara menjadi warga Negara supaya dapat diandalkan oleh bangsa juga Negara. (M. N., Somantri;, 2001). Bahwa PPKn dapat diartikan ialah sebagai penyiapan bagi generasi muda (siswa) atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, serta juga nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif didalam bermasyarakat. (Usmi, Rianda ; Samsuri;, 2022).

Faktor pembiasaan yang dilakukan oleh guru pada peserta didik akan berpengaruh kepada siswa. Peranan guru di dalam kelas diantaranya guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai evaluator. (Mulyono, Budi ;, 2017). Sedangkan menurut Tabrani Rusyan, mengemukakan bahwa fungsi dan peran guru adalah sebagai berikut: guru sebagai pendidik dan pengajar; guru sebagai anggota masyarakat, guru harus pandai bergaul dengan masyarakat; guru sebagai pemimpin, guru harus pandai memimpin; guru sebagai pelaksana administrasi akan dihadapkan kepada administrasi-administrasi yang harus dikerjakan disekolah; guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, harus menguasai situasi belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. (Rusyan, A. Tabrani;, 1990).

Menurut Wina Sanjaya, merumuskan empat peran guru dalam pendidikan yaitu: guru sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran; guru sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman; guru sebagai demonstrator, dapat diartikan guru harus menjadi teladan bagi siswa; guru sebagai evaluator, guru tidak hanya mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik dalam perbaikan selanjutnya, namun juga melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran. (Murtiningsih, Ika dkk;, 2022).

### **Penanaman *Civic Disposition* Bagi Siswa**

Lawrence Kohlberg, dalam "*The Philosophy of Moral Development*" (1981:127), melihat penanaman *civic disposition* sebagai bagian dari perkembangan moral individu. Kohlberg mengemukakan bahwa *civic disposition* berkembang seiring dengan kematangan moral, di mana peserta didik menginternalisasi prinsip-prinsip etika universal dan tanggung jawab sosial melalui proses pendidikan yang mendukung perkembangan moral. *Civic disposition* mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan seorang warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Kewarganegaraan Aktif: Mendorong peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan politik, sosial, dan komunitas yang mendukung proses demokrasi dan kehidupan sosial. Ini termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, pertemuan masyarakat, dan kegiatan yang mempromosikan kepentingan umum;
- b. Tanggung Jawab Sosial: Mengajarkan peserta didik untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengembangkan komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab;

- c. Kepatuhan Hukum: Membantu peserta didik memahami dan menghargai peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat, serta pentingnya mengikuti norma dan aturan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan;
- d. Empati dan Kepedulian: Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk merasakan dan memahami kebutuhan dan masalah orang lain, serta berusaha untuk membantu dan mendukung mereka dalam konteks sosial.

Adapun tujuan penanaman Civic Disposition yaitu: Membentuk Karakter: Membantu peserta didik mengembangkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti keadilan, integritas, dan solidaritas; Meningkatkan Partisipasi: Mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan komunitas mereka; Meningkatkan Kesadaran Sosial: Membantu peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta peran mereka dalam masyarakat. Sementara yang menjadi metode penanaman civic disposition yakni: Penanaman civic disposition dapat dilakukan melalui berbagai metode pendidikan; Integrasi Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewarganegaraan, studi tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam situasi sosial nyata; Pengalaman Praktis: Memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proyek layanan masyarakat, simulasi proses demokrasi, dan aktivitas komunitas; Model Peran dan Diskusi: Menggunakan contoh model peran yang menunjukkan sikap *civic disposition* yang diinginkan serta mengadakan diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Penanaman civic disposition bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga memiliki sikap dan kebiasaan yang mendukung peran mereka sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

*Civic Disposition* sesungguhnya sangatlah diperlukan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan *civic disposition* inilah sekolah melalui pembelajaran PPKn di sekolah dalam proses kegiatannya hal ini bertujuan menanamkan *civic disposition* peserta didik. Maka dengan adanya mata pelajaran PPKn ini bisa menanamkan *civic disposition* disekolah. Menanamkan *civic disposition* seperti mencintai tanah air seperti saling menghormati, adanya kebersamaan dan bergotong royong dengan baik dan menjunjung tinggi rasa memiliki semangat kebangsaan. Pembentukan *Civic Disposition* dengan cara guru membimbing merupakan strategi guru dalam pembentukan *civic disposition*, karena dengan adanya rasa peduli terhadap peserta didik, berarti mempunyai rasa hak dan kewajiban yang sama terhadap peserta didik untuk saling membantu. Berkaitan dengan mengimplementasikan *civic disposition*. Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga Negara, baik karakter privat seperti

tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga Negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kompromi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moh. Nazir, mengatakan bahwa pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. (Nazir, Moh ;, 2009). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial dari sudut pandang peserta. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengutamakan data numerik dan analisis statistik, penelitian kualitatif lebih fokus pada makna, konteks, dan pengalaman subjektif individu atau kelompok. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah interaktif (saling berhubungan), partisipatoris (keikutsertaan) serta memahami cara hidup dari pandangan orang yang terlibat di dalamnya. Dengan penggunaan metode kualitatif, maka data yang akan didapat lebih lengkap, mendalam dan bermakna agar tujuan penelitian tercapai. Menurut Sugiyono, tujuan metode penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. (Sugiyono, 2016).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Temuan Penelitian

Selama berada di lokasi penelitian yakni di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan kepada siswa. Wawancara yang dilakukan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

#### **Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan *Civic Disposition* bagi Peserta Didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe, bahwa *civic disposition* telah ditanamkan bagi peserta melalui guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Murni Lahagu, S.Th, selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, beliau menjelaskan: Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, khususnya dalam menanamkan *civic disposition*. Di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, guru PPKn bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saya melihat bagaimana mereka membimbing siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Dengan pendekatan yang humanis dan dialogis, guru PPKn mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan etika publik sejak dini. Ini sangat penting demi menciptakan generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab sebagai warga negara. *Civic disposition* sangat penting karena membentuk karakter dan sikap siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di tingkat SMP, peserta didik sedang dalam proses pembentukan identitas, dan inilah saat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap sesama.

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Mesrawati Ndruru S.Pd, mengungkapkan bahwa: Sebagai guru PPKn, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik. *Civic disposition* bukan hanya soal pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga tentang sikap dan kebiasaan yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembelajaran, saya selalu berusaha mengaitkan materi dengan situasi nyata agar siswa dapat memahami pentingnya nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Melalui diskusi kelas, studi kasus, dan proyek sosial sederhana, kami dorong siswa untuk tidak hanya paham, tapi juga terbiasa bersikap sebagai warga negara yang baik.

Kemudian menurut Nolis Esteriani Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara Kemudian menurut Nolis Esteriani Lahagu, Jhosep Tri Anugerah Gulo, Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara memberikan keterangan, bahwa peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe utara. Para pihak yang diwawancarai sepakat bahwa Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara memiliki peran strategis dalam membentuk *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan peserta didik. *Civic disposition* mencakup sikap tanggung jawab, toleransi, keadilan, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, guru PKn tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis,

tetapi juga membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menanamkan sikap positif terhadap negara dan masyarakat.

### **Kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

Dalam penanaman *civic disposition* kepada peserta didik, tidak terlepas dari temuan kendala bahkan kelemahan sehingga penanaman sikap kenegaraan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Murni Lahagu, S.Th, selaku Kepala Sekolah bahwa: Ada beberapa kendala yang kami identifikasi. Pertama, pengaruh lingkungan luar seperti media sosial dan tontonan yang kurang mendidik sangat besar terhadap perilaku siswa. Hal ini sering kali berlawanan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh guru PPKn. Kedua, waktu pembelajaran PPKn yang terbatas membuat guru tidak bisa mendalami materi secara maksimal, apalagi untuk membentuk sikap dan karakter siswa.

Hal tersebut juga didukung oleh Ibu Mesrawati Ndruru, S.Pd selaku guru PPKn, yang mengungkapkan bahwa: Sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, saya menyadari bahwa menanamkan *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan kepada peserta didik bukanlah hal yang mudah. Ada sejumlah tantangan yang kami hadapi di lapangan. Selain itu, alokasi waktu pembelajaran PPKn dalam kurikulum cukup terbatas. Sementara, untuk membentuk sikap dan karakter tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa jam per minggu. Dibutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, yang melibatkan seluruh unsur sekolah dan juga keluarga.

Kemudian menurut hasil wawancara dari siswa Nolis Esteriani Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa : Kemudian menurut hasil wawancara dari siswa Nolis Esteriani Lahagu, Josep Tri Anugerah Gulo, Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa: Kendala utama dalam pengajaran *civic disposition* di sekolah adalah terbatasnya waktu untuk membahas materi secara mendalam. Kepala sekolah dan guru mengungkapkan bahwa materi pelajaran PPKn yang padat sering kali menghalangi diskusi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan sikap kenegaraan. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan luar sekolah, seperti keluarga dan masyarakat, juga menjadi tantangan, karena nilai-nilai yang diajarkan di sekolah kadang tidak sejalan dengan yang diterima siswa di rumah atau masyarakat. Siswa juga merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan antusias,

karena terkadang mereka merasa kurang tertarik dengan teori yang disampaikan dan tidak melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan sosial atau diskusi yang berkaitan dengan *civic disposition*, karena merasa itu hanya sekadar kewajiban.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi adalah waktu yang terbatas, kurangnya motivasi dari siswa, serta kurangnya kerjasama yang erat antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap kenegaraan.

### **Upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

Wawancara ini dilakukan dengan kepala sekolah UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, yang memberikan pandangan dan informasi mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik. Adapun pernyataan Bapak Murni Lahagu, S.Th selaku Kepala Sekolah adalah: Guru PPKn di sekolah kami terus berupaya mengatasi kendala yang ada, terutama pengaruh negatif dari lingkungan luar seperti media sosial. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan kontekstual, seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus. Dengan begitu, siswa bisa memahami nilai-nilai kewarganegaraan melalui pengalaman langsung, bukan hanya lewat teori. Selain itu, para guru juga mengintegrasikan nilai-nilai civic disposition dalam kegiatan sekolah, seperti kerja bakti, OSIS, dan proyek profil pelajar Pancasila. Ini penting agar siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga mempraktikkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kesehariannya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Mesrawati Ndruru, S.Pd yang mengungkapkan bahwa: Salah satu kendala utama yang saya hadapi adalah kurangnya dukungan dari lingkungan luar, terutama dari media sosial yang sering membawa pengaruh negatif bagi siswa. Untuk mengatasi ini, saya berusaha membangun komunikasi yang kuat dengan siswa dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Saya juga menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Harapannya, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, misalnya dalam hal sikap toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi.

Kemudian menurut Nolis Esteriani Lahagu, Jhosep Tri Anugerah Gulo, Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa: guru PPKn telah berupaya secara aktif dan kreatif dalam menanamkan nilai-nilai *civic disposition*

meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya minat sebagian siswa, pengaruh lingkungan luar, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Para siswa merasakan bahwa guru berusaha menggunakan metode pembelajaran yang menarik, seperti diskusi, pemberian contoh konkret, dan simulasi, untuk membantu mereka lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan.

### **Pembahasan**

*Civic disposition* atau sikap kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang mencerminkan perilaku dan sikap warga negara yang baik. Guru PKn memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama di jenjang SMP, saat peserta didik sedang dalam tahap perkembangan karakter yang signifikan.

#### **Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan *Civic Disposition* bagi Peserta Didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) peserta didik. *Civic disposition* sendiri mencakup sikap dan kebiasaan berpikir serta bertindak yang mencerminkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, toleran, aktif, dan demokratis. Sabar Budi Raharjo, menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan karakter dan kebiasaan berpikir serta bertindak sebagai warga negara yang baik. (Raharjo, Sabar Budi, 2012). Oleh karena itu, guru PPKn harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memahami, merasakan, dan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. *Civic disposition* dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang integratif, partisipatif, dan kontekstual, yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sosial di dalam dan luar sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya minat siswa terhadap pelajaran PPKn yang dianggap kurang aplikatif, serta keterbatasan media pembelajaran yang menarik. Untuk mengatasi hal ini, guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran yang bermakna, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajar. Dengan demikian, peran guru PPKn sangat penting dalam menanamkan *civic disposition*. Keberhasilan guru dalam menjalankan peran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya generasi muda yang sadar hak dan kewajibannya, mencintai negaranya, dan siap berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

## **Kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan Civic Disposition bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

Menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik merupakan bagian penting dari tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Civic disposition* mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanaman nilai-nilai tersebut. Menurut Hoskins dan Crick, kendala utama dalam menanamkan *civic disposition* adalah karena pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada kognitif semata. Mereka menekankan bahwa *civic disposition* tidak hanya dapat dibentuk melalui pengetahuan, tetapi memerlukan pendekatan afektif dan partisipatif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan kehidupan sosial di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang monoton menjadi salah satu faktor penghambat. (Hoskins, Bryony ; Crick, Ruth Deakin ;, 2008). Selanjutnya Winataputra , juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam pembelajaran PPKn adalah minimnya media dan sumber belajar yang kontekstual, yang menyebabkan siswa kesulitan mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. (Winataputra, U.S.;, 2011). Kondisi ini relevan dengan situasi di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, di mana masih terbatasnya sarana pembelajaran dan pengayaan membuat guru kurang optimal dalam menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa kendala guru dalam menanamkan *civic disposition* bukan hanya berasal dari metode mengajar, tetapi juga dari faktor eksternal seperti dukungan lingkungan, fasilitas sekolah, dan budaya belajar siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang kolaboratif dan kontekstual agar pembelajaran PPKn dapat mencapai tujuannya secara utuh.

## **Upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan Civic Disposition bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara**

*Civic Disposition* atau sikap kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam pendidikan PPKn yang mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, kepedulian, toleransi, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn menghadapi sejumlah kendala dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Tujuan utama dari penguatan *civic disposition* adalah agar peserta didik tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn sering menghadapi berbagai kendala dalam proses penanaman nilai-nilai tersebut. Guru PPKn di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara berperan sentral dalam menanamkan *civic disposition*, meskipun menghadapi berbagai kendala. Melalui kombinasi pendekatan pedagogis, keteladanan, kolaborasi dengan orang tua, dan pemanfaatan media, mereka berupaya secara aktif menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Kendati hasilnya tidak instan, upaya ini menjadi landasan penting bagi pengembangan warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan mencakup sikap tanggung jawab, toleransi, keadilan, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, guru PPKn tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menanamkan sikap positif terhadap negara dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penanaman *civic disposition* sangat bergantung pada kompetensi pedagogik, kepribadian, serta kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan realitas sosial siswa. Pembelajaran PPKn yang diterapkan oleh guru PPKn dan kepala sekolah sangat berpengaruh pada perkembangan sikap dan perilaku siswa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kendala dalam pengajaran *civic disposition* di sekolah adalah terbatasnya waktu untuk membahas materi secara mendalam. Materi pelajaran PPKn yang padat sering kali menghalangi diskusi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan sikap kenegaraan. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan luar sekolah, seperti keluarga dan masyarakat, juga menjadi tantangan, karena nilai-nilai yang diajarkan di sekolah kadang tidak sejalan dengan yang diterima siswa di rumah atau masyarakat. Siswa juga merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan antusias, karena terkadang mereka merasa kurang tertarik dengan teori yang disampaikan dan tidak melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan sosial atau diskusi yang berkaitan dengan *civic disposition*, karena merasa itu hanya sekadar kewajiban.

Upaya kepala sekolah dan guru Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan secara aktif dan kreatif dalam menanamkan nilai-nilai *civic disposition*. Para siswa merasakan bahwa guru berusaha menggunakan metode pembelajaran yang menarik, seperti diskusi, pemberian contoh konkret, dan simulasi, untuk membantu mereka lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengungkapkan beberapa saran, antara lain: Bagi Kepala Sekolah : Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal kepada guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, pelatihan berkala untuk peningkatan kompetensi guru, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan nilai-nilai karakter dan kewarganegaraan; Bagi Guru : Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disarankan untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran agar penanaman *civic disposition* lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai kehidupan sehari-hari akan membantu siswa lebih mudah memahami serta menginternalisasi sikap kewarganegaraan. Selain itu, guru hendaknya menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan interaksi sosial, karena keteladanan merupakan sarana penting dalam pendidikan karakter. Guru juga diharapkan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua serta berkolaborasi dengan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila; Bagi Siswa : Peserta didik diharapkan dapat lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk sikap dan karakter sebagai warga negara yang baik. Siswa perlu mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, siswa akan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan kehidupan sosial dengan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

Ahmad, Zayadi; Majid, Abdul ;. (2005). Tadzkiyah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Berdasarkan Pendekatan Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Branson & Quigley. ((1998)). Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 15–26. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2059>
- Hoskins, Bryony ; Crick, Ruth Deakin ;. (2008). *Learning to Learn and Civic Competences: different currencies or two sides of the same coin?* Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- M. N., Somantri;. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan PKn*. Bandung: Remaja Rosda Karya dan PPS UPI.
- Mulyono, Budi ;. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218-225. Diambil kembali dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17007>
- Murtiningsih, Ika dkk;. (2022). Penanaman Civic Disposition Dalam Membentuk Generasi Cerdas Berkarakter . *Educate: Journal of Community Service in Education*, 2(1), 24-30. Diambil kembali dari <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/educate/article/view/2521/pdf>
- Mutmainah, Dewi ; Kamaluddin;. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 45-54. Diambil kembali dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/673>
- Nazir, Moh ;. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Sabar Budi;. (2012). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511-532. Diambil kembali dari <https://scholarhub.uny.ac.id/jpep/vol16/iss2/7/>
- Rusyan, A. Tabrani;. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Yayasan Karya.
- Sadulloh , Uyoh;. (2010). *Pedagogik (Ilmu Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini ;. (2010). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Edisi 3 ed.)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usmi, Rianda ; Samsuri;. (2022). Urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 149-160. Diambil kembali dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2834654>
- Winataputra, U.S.;. (2011). *Dinamika Konseptualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah*

(Suatu Telaah Collective Mindset Dalam Ranah Historisepistemologis). *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 1-20. Diambil kembali dari <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://core.ac.uk/download/pdf/236388787.pdf>